

ABSTRAKSI

Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Tranmigrasi No.19 Tahun 2012 tentang Syarat-syarat Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan Kepada Perusahaan Lain, yang membatasi hanya 5 (lima) pekerjaan yang diperbolehkan dalam pelaksanaan “*Labour Supply*” atau yang lebih dikenal sebagai Outsourcing tenaga kerja. Pekerjaan yang dimaksud adalah seperti yang tercakup dalam Penjelasan Pasal 66 (1) UU No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan: “***Kegiatan tersebut antara lain:*** usaha pelayanan kebersihan (*cleaning service*), usaha penyediaan makanan bagi pekerja/buruh (*catering*), usaha tenaga pengaman (*security*/satuan pengamanan), usaha jasa penunjang di pertambangan dan perminyakan, serta usaha penyediaan angkutan pekerja/buruh.” Permasalahan yang dibahas didalam tesis ini adalah mengenai Kontruksi hukum dan akibat hukum pelaksanaan kontrak perjanjian pemborongan atau penyediaan jasa pekerja/buruh yang tidak sesuai dengan Permenakertrans No.19 Tahun 2012 tentang Syarat-Syarat Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan Kepada Perusahaan Lain akan tetapi tidak bertentangan dengan Undang-Undang No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. Metode hukum yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif yang ditujukan untuk melakukan analisis terhadap peraturan perundang-undangan, yurisprudensi. Pendekatan yang gunakan adalah pendekatan konseptual dan pendekatan Undang-Undang.